

“economic conditions are constantly changing, and each generation looks at its own problems in its own way”
Alfred Marshall

MEREKA PENDIDIKAN EKONOMI PLURALISTIK

HARI WAHYONO

SEKAPUR SIRIH

Ketika gurunya sedang asyik menjelaskan topik tentang pentingnya perdagangan dalam perekonomian, dan memberikan ilustrasi dengan memaparkan dampak positif atas kemunculan “Indomaret” dan “Alfamart” di berbagai wilayah kota hingga ke kampung-kampung, sehingga masyarakat mudah mengaksesnya untuk memperoleh barang kebutuhan sehari-hari, Ayon salah satu murid berpikir lain, dalam benaknya munculnya kedua gerai retail itu justru menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian masyarakat, tetangganya mbok Darmi, pak Narji dan tantenya Susi yang memiliki toko kelontong terpaksa menutup usaha penopang kehidupannya karena kalah bersaing. Ketika Ayon mengungkapkan kegalauannya dan mempertanyakan, bagaimana menyelesaikan masalah atas dampak negatif keberadaan Indomaret dan Alfamart terhadap toko kelontong milik tetangga dan tantenya, gurunya ganti yang mengalami kegalauan.

Ilustrasi di atas memberikan sedikit gambaran tentang masalah dalam pendidikan ekonomi yang terbelenggu oleh kurikulum yang terpusat; tujuan pendidikan yang tidak jelas arahnya; materi yang bersifat *monism* (titik pandang atau teori yang mereduksi seluruh fenomena ke dalam satu prinsip); pembelajaran kurang mengakses variabilitas fenomena yang ada di lingkungan kehidupan peserta didik; kompetensi profesional sebagian besar guru kurang memadai (terutama atas pengetahuan aktual teori dan dinamika perekonomian); dan sejumlah permasalahan lain. Berbagai masalah yang menghadang dunia pendidikan ekonomi di Indonesia, membutuhkan pemecahan komprehensif.

Esensi Pendidikan Ekonomi

Pendidikan ekonomi sesuai dengan pengertian yang diungkap oleh National Council Of Economic Education (NCEE) yang sekarang diubah menjadi Council Of Economic Education (CEE) yang berkedudukan di Amerika Serikat, dapat dimaknai dalam 2 (dua) konteks tujuan dan fungsi sebagai berikut:

1. *The current state of, and efforts to improve, the economics*

curriculum, materials and pedagogical techniques used to teach economics at all educational levels;

2. *Research into the effectiveness of alternative instructional techniques in economics, the level of economic literacy of various groups, and factors that influence the level of economic literacy.*

Dari pengertian tersebut nampak bahwa pendidikan ekonomi pada

Alamat Korespondensia:

Hari Wahyono, dosen Universitas Negeri Malang

E-mail: hariwahn@icloud.com

prinsipnya terkait dengan segala macam kondisi dan upaya untuk meningkatkan segala aspek pembelajaran ekonomi di segala jenjang pendidikan mencakup penelitian yang diperlukan sebagai landasan untuk mengupayakan peningkatan yang dimaksud. Dalam kajian yang lebih lanjut, sebenarnya pendidikan ekonomi dapat pula dimaknai dalam konteks tujuan dan fungsi untuk meningkatkan strategi guna menanamkan ideologi untuk mempengaruhi perilaku ekonomi masyarakat (*improve strategy to plant ideology to influence economic behavior*). Dalam makna yang terakhir terjadinya perubahan perilaku ekonomi menjadi sasaran dan fokus pendidikan ekonomi, dan perubahan yang dimaksud selayaknya diacukan pada sistem dan tata nilai ekonomi yang diidealkan oleh negara dan warga bangsa dimana pendidikan ekonomi dikembangkan dan dilaksanakan. Pada tataran ini kajian atas materi dan topik-topik pendidikan ekonomi perlu dilakukan secara mendalam, dan dievaluasi tentang keterkaitannya dengan *school of thought* atau aliran atau mazhab ekonomi yang beragam macamnya, dan dianut sebagai dasar pengembangan ekonomi beragam negara dan akhirnya mempengaruhi perilaku ekonomi warga masyarakat di berbagai belahan dunia.

Upaya perubahan perilaku ekonomi sesuai dengan nilai-nilai ideal ekonomi yang sesuai dengan kehidupan dan budaya bangsa serta cita-cita luhur pendiri bangsa, terlebih sesuai dengan nilai-nilai perilaku ekonomi ideal yang bersifat universal, selayaknya dilakukan dengan memperluas wawasan peserta didik atas berbagai aliran atau mazhab ekonomi yang pernah ada,

masih berkembang dan dianut sebagai dasar pengambilan kebijakan dan acuan perilaku ekonomi masyarakat. Wawasan yang luas juga perlu ditanamkan pada peserta didik atas ragam kondisi kehidupan ekonomi masyarakat yang sungguh majemuk, beragam kebijakan ekonomi dan dampaknya bagi kehidupan ekonomi warga negara. Dengan wawasan yang luas dan beragam pada tataran aliran dan teori serta kondisi kehidupan ekonomi masyarakat, akan membuat peserta didik memiliki kesadaran tinggi atas adanya perbedaan pada berbagai aspek teori ekonomi dan kehidupan ekonomi, dan dengan kesadaran atas adanya perbedaan, tumbuh penghargaan dan empati pada perbedaan, serta pada akhirnya dengan bijak akan menumbuhkan dan mempraktekkan perilaku ekonomi yang rasional, bermoral, dan altruistik. Dengan pemaknaan pendidikan ekonomi seperti teruraikan di atas, pengembangan pendidikan ekonomi pada berbagai jalur dan jenjang pendidikan, selayaknya diarahkan untuk menumbuhkan sikap dan perilaku yang membangun kesadaran atas adanya perbedaan, tanpa terjebak pada ideologi ekonomi tertentu, sehingga rasa berkepentingan atas urgensi kebersamaan dalam perbedaan ideologi, kondisi, dan kehidupan ekonomi terbangun pada peserta didik. Pengembangan pendidikan ekonomi selayaknya dilandasi oleh pluralisme.

PENDIDIKAN MEMBENTUK PELAKU EKONOMI BERKUALITAS

Kesadaran akan pentingnya pengembangan sumberdaya manusia sebagai pemicu keberhasilan pembangunan ekonomi telah tumbuh se-

jak para ekonom mulai memikirkan pertumbuhan ekonomi. Secara eksplisit pada awal perempat akhir abad XVIII, Adam Smith mengungkapkan tentang peran kerja dan produktivitas pekerja bagi kemakmuran suatu bangsa. Surplus sebagai dasar pembentukan kapital akan dapat dicapai oleh suatu bangsa, manakala produktivitas tenaga kerja yang menggerakkan sektor produktif perekonomian suatu negara terus ditingkatkan. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi guna meraih kemakmuran, peningkatan produktivitas pekerja merupakan suatu keniscayaan. Pemikiran Adam Smith ini menjadi pemicu pengembangan kajian dan teori pembangunan ekonomi berbasis pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

Kajian tentang peran sumberdaya manusia dalam pembangunan ekonomi dalam dimensi yang agak berbeda, tumbuh pada awal abad XIX. Sumberdaya manusia dalam perekonomian tidak sekedar dilihat dari perannya sebagai tenaga kerja yang menggerakkan mesin-mesin produksi bagi pertumbuhan ekonomi, akan tetapi secara lebih luas, dikaji pula sumbangannya dalam perekonomian, terkait dengan kemampuannya untuk mengelola sumberdaya lain melalui inovasi, pengembangan kapital, penciptaan peluang usaha dan kerja, serta keberanian menanggung resiko dalam suatu organisasi untuk menghasilkan produk barang dan jasa. Pengungkapan peran sumberdaya manusia sebagai wirausaha (*entrepreneur*), dilakukan pertama kali oleh Jean-Baptiste Say (1803). Meskipun demikian sebenarnya Say hanya mengembangkan pemikiran sebelumnya, yang diungkapkan oleh Richard Cantillon (1755). Selanjut-

nya studi lebih luas dan mendalam tentang peran sumberdaya manusia sebagai *entrepreneur* bagi pertumbuhan ekonomi, baru berkembang lebih dari satu abad berikutnya, ketika Joseph Schumpeter menerbitkan bukunya "*The Theory of Economic Development*" di tahun 1934. Bertolak dari pemikiran Schumpeter berkembang kajian-kajian tentang peran penting sumberdaya manusia sebagai wirausaha dalam perekonomian dan pembangunan ekonomi, seperti yang dilakukan oleh Frank H. Knight (1961), yang meninjau kewirausahaan dari masalah resiko dan ketidakpastian; Harvey Leibenstein (1968), yang mengkaitkan kewirausahaan dengan pembangunan; dan Peter Drucker (1986), yang mengkaji masalah inovasi dan kewirausahaan. Berbagai studi terbaru juga membuktikan adanya pengaruh positif kewirausahaan terhadap pertumbuhan dan kemajuan ekonomi suatu negara.

Berbagai pemikiran tentang peran sumber daya manusia bagi pembangunan ekonomi, sejak awal mulanya hingga menjelang akhir perempat pertama abad XXI ini, lebih menitik beratkan sumberdaya manusia pada sisi sumbangannya bagi kegiatan produktif dalam roda kehidupan ekonomi, baik sebagai tenaga kerja maupun wirausaha. Sumberdaya manusia lebih diposisikan sebagai salah satu faktor produksi yang produktivitas dan kreasi inovatifnya sangat menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Konsepsi yang demikian pada dasarnya benar belaka, meskipun demikian sebenarnya terdapat sisi lain yang perlu mendapatkan perhatian serius dalam menempatkan peran sumberdaya manusia bagi pembangunan

ekonomi. Lebih dari sekedar berperan sebagai faktor produksi, sumberdaya manusia berperan pula sebagai pelaku ekonomi, yang keputusan dan tindakan ekonominya berpengaruh dan mewarnai kehidupan ekonomi tidak saja pada tataran mikro, tetapi juga makro. Dalam konteks yang lebih luas, sumberdaya manusia sebagai pelaku ekonomi dapat berperan dalam memacu pertumbuhan ekonomi, baik dalam kegiatan produktif maupun konsumtif. Dalam kegiatan produktif sumberdaya manusia sebagai pelaku ekonomi, melakukan berbagai kegiatan lebih dari sekedar menjalankan perannya sebagai tenaga kerja atau wirausaha di sektor-sektor produktif. Berbagai kegiatan seperti menabung, berinvestasi (penyertaan modal dalam usaha, pembelian saham atau obligasi), jual-beli logam mulia, tanah ataupun properti, dan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk kegiatan produktif lain, merupakan contoh-contoh kegiatan produktif di luar peran sebagai faktor produksi, dan kegiatan-kegiatan tersebut selain memberikan tambahan pendapatan secara individual, secara makro juga memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Dalam kaitannya dengan kegiatan konsumtif, tidak dapat diingkari ada peran yang dapat disumbangkan sumberdaya manusia sebagai pelaku ekonomi, terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama dalam konteks makro ekonomi (Schug & Wood, 2011).

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui pendidikan, selayaknya tidak sekedar difokuskan pada mengupayakan meningkatnya produktivitas sumberdaya manusia dalam perannya sebagai tenaga kerja dan wirausaha yang menggerakkan

mesin-mesin produktif perekonomian. Lebih dari itu, urgensi atas peningkatan kualitas sumberdaya manusia seharusnya diletakkan dalam cakrawala yang lebih luas, memandang sumberdaya manusia sebagai pelaku ekonomi yang tindakan-tindakan ekonominya dalam skop mikro maupun makro memberi warna dan pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (VanFossen, 2011). Kegiatan pendidikan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, berdasar premis tersebut, seyogyanya diarahkan pada upaya membentuk sumberdaya manusia dengan perilaku ekonomi yang rasional dan bermoral, baik dalam kegiatan produktif maupun konsumtif.

Seperti diketahui asumsi dasar yang dikembangkan sejak kemunculan ilmu ekonomi menyatakan, bahwa manusia dalam perilaku ekonomi senantiasa bertindak rasional, digerakkan oleh kepentingan pribadi, berupaya memaksimalkan utilitasnya, dan tidak peduli dengan pihak lain. Asumsi yang demikian sejak pertengahan abad XX tidak lagi dijadikan acuan, oleh karena secara aktual, ada faktor-faktor lain yang menggerakkan perilaku ekonomi manusia. Seperti diungkapkan oleh Bina Agarwal & Alessandro Vercelli (2003):

“Under standard economic assumptions, human beings are presumed to be narrowly rational, motivated by individual self-interest, preoccupied with maximizing personal utility or satisfaction, driven by cold economic calculation without concern for others, capable of instantaneous learning,

and so on. Real people are found to be more complex, driven not just by selfinterest but also by altruism, guilt, liking, and other emotions.”

Jelaslah bahwa dalam kenyataan, manusia mengembangkan perilaku ekonomi yang lebih kompleks, tidak hanya digerakkan oleh kepentingan pribadi, tetapi juga digerakkan oleh keinginan untuk mengutamakan kepentingan orang lain, perasaan bersalah, kegemaran, dan reaksi-reaksi psikologis yang lain. Kompleksitas perilaku ekonomi manusia dalam wacana kepentingan peningkatan kualitas sumberdaya manusia, menuntut pengembangan program pendidikan berkarakteristik khusus yang mampu menjadikan sumberdaya manusia, berperilaku rasional secara ekonomi dan mempertimbangkan etika moral tindakannya, serta berkemampuan mengelola reaksi psikologis dalam berekonomi. Program pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan ekonomi.

WAJAH BURUK PENDIDIKAN EKONOMI DI NEGERI INI

Sejumlah fenomena dapat dipaparkan untuk membuktikan belum efektifnya pelaksanaan program pendidikan ekonomi di negeri tercinta ini.

1. Produktivitas sumberdaya manusia relatif masih rendah. Data tentang produktivitas tenaga kerja pada berbagai subsektor usaha yang tersedia di Badan Pusat Statistik memang terlihat mengembirakan, mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Meskipun demikian dalam pengamatan keseharian tak pelak akan diperoleh gambaran yang berbeda. Di kalangan pegawai negeri yang

ukuran produktivitasnya mengacu pada layanan masyarakat, secara umum pada berbagai bidang layanan belum memadai. Selain itu pada berbagai sektor informal produktivitas sumberdaya manusia masih jauh dari harapan.

2. Minat dan semangat menabung dan berinvestasi di kalangan pelaku ekonomi masih memprihatinkan, tidak sebanding dengan semangat dan minat untuk berkonsumsi melalui kredit. Pemahaman dan kesadaran atas *opportunity cost* untuk memegang uang tunai maupun pemanfaatan uang untuk mengkonsumsi barang/jasa tidak dimiliki oleh sebagian besar pelaku ekonomi.
3. Masih banyak pelaku ekonomi yang mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan prinsip-prinsip rasionalitas ekonomi (*trade off, opportunity cost, marginalism, dan incentive*), yang mengakibatkan tidak efektifnya kegiatan produktif dan tidak efisiennya aktivitas konsumtif pelaku ekonomi.
4. Jebakan emosi berkonsumsi dari produsen dan agen-agen distributornya, yang memerangkap pelaku ekonomi untuk berkonsumsi tanpa mempertimbangkan batas kemampuan, tingkat intensitas kebutuhan dan pentingnya mengelola keinginan.
5. Berbagai penelitian yang dilakukan terhadap siswa jenjang pendidikan menengah, mahasiswa dan bahkan guru ekonomi, membuktikan bahwa literasi ekonomi (pemahaman dasar tentang bagaimana perekonomian bekerja) dan literasi keuangan (pemahaman dasar tentang pemanfaatan uang secara efektif

dan efisien), mereka masih rendah.

6. Kurang bahkan dapat dikatakan tidak adanya respon atas praktek kegiatan ekonomi di sekitarnya yang menumbuhkan ketimpangan, ketidakadilan, kerusakan lingkungan dan praktek kegiatan ekonomi negatif lainnya. Senyampang tidak bersentuhan dengan kepentingan pribadinya, pelaku ekonomi tidak bereaksi terhadap kegiatan ekonomi satu pihak yang merugikan pihak lainnya.
7. Masih marak praktek kriminal dalam kegiatan ekonomi, mulai dari pemalsuan produk, penipuan berkedok hadiah, investasi bodong, penyelundupan, tidak memenuhi kewajiban dalam hutang-piutang maupun pembayaran pajak, perdagangan narkoba, hingga yang paling cetar membahana yaitu korupsi.

Apabila diidentifikasi secara lebih komprehensif dan mendalam, niscaya akan makin panjang daftar fenomena memprihatinkan tentang kelemahan-kelemahan perilaku ekonomi sumberdaya manusia atau masyarakat dalam kehidupan ekonomi di Indonesia. Dirunut ke belakang fenomena tersebut terjadi karena ketidakefektifan pelaksanaan pendidikan ekonomi, baik pada jalur formal, nonformal maupun informal.

Pada jalur formal, terbentang berbagai masalah yang saling berkaitan satu dengan yang lain, kompleks dan memerlukan kecermatan untuk mengurainya. Ujung masalahnya bisa berawal dari pihak-pihak yang ada dalam sistem birokrasi pendidikan, utamanya di Pusat Pengembangan Kurikulum. Dilihat dari produk kurikulum yang mereka hasilkan, nampak tidak adanya pemahaman dan kesadaran

akan urgensi peran pendidikan ekonomi dalam membentuk sikap dan perilaku efektif dan efisien secara ekonomi dilandasi oleh etika moral yang benar dan kemampuan untuk mengelola reaksi psikologis dalam berekonomi. Tanda pemahaman dan kesadaran tersebut, visi dan misi yang hendak dicapai dalam pendidikan ekonomi menjadi tidak jelas, dan kurikulum yang dikembangkan serta diberlakukan meleset dan tidak tepat sasaran. Kompetensi yang hendak digarap dan ditanamkan pada peserta didik sebatas pada tataran kognitif dengan pemahaman dangkal, sehingga sulit mengharap pengetahuan ekonomi yang tertanam akan secara efektif mempengaruhi sikap dan perilaku peserta didik.

Pada tataran berikutnya, kelemahan nampak pada Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), utamanya Jurusan Pendidikan Ekonomi produsen yang menghasilkan guru-guru ekonomi. Kurikulum dan pelaksanaannya dalam praktek pendidikan, tidak beda dengan pelaksanaan pendidikan di jenjang bawahnya. Perumusan kurikulum di LPTK Jurusan Pendidikan Ekonomi, mengacu pada Kurikulum Nasional yang tanpa visi misi jelas, diperkaya dengan serangkaian mata kuliah yang juga kurang berkontribusi, pada pembentukan guru ekonomi yang seharusnya memiliki perilaku ekonomi patut diteladani oleh peserta didiknya. Pelaksanaan pendidikannya juga menaburkan aroma kelemahan, dosen-dosen banyak yang tidak kompeten sesuai dengan disiplin yang dikuliahkan. Berkedok dibalik Tri Dharma Perguruan, tugas utama untuk melaksanakan pembelajaran, seringkali terabaikan, lebih membenamkan diri dalam kesibukan untuk melakukan

penelitian dan pengabdian masyarakat yang sebenarnya dimotifi oleh kepentingan pengembangan karir pribadi untuk kenaikan jenjang kepangkatan dan meraih gelar guru besar, yang tujuannya lumayan.

Dalam pelaksanaan pendidikan ekonomi di jenjang pendidikan dasar hingga menengah, kelemahan yang berawal dari rendahnya kualitas kurikulum, diperparah oleh praktek pembelajaran ekonomi yang kurang berkualitas. Kompetensi tenaga pendidik yang kurang memadai disertai dengan kekurangpahaman dan kesadaran tentang tujuan yang seharusnya dicapai dalam pendidikan ekonomi, menjadikan kegiatan pembelajaran ekonomi di bangku-bangku kelas berlangsung tanpa greget dan sebatas memahami dan membaca bersama buku paket yang kualitasnya belum dikaji secara mendalam. Sistem pendidikan yang dikembangkan oleh pengambil kebijakan di jajaran birokrasi mengukung dan menjadikan guru bekerja tak beda dengan pekerja kantor, terjebak dalam rutinitas, dan tak memiliki ruang untuk berkreasi guna memperkaya pengalaman belajar bagi anak didiknya. Kondisi ini diperparah oleh sarana dan prasarana yang kurang memadai. Tak dapat diingkari pembelajaran ekonomi membutuhkan sumber-sumber belajar yang kaya dan bervariasi, faktanya sering hanya tersedia satu sumber belajar, yaitu buku paket. Pada ujungnya sudah dapat ditebak pelaksanaan pendidikan ekonomi di sekolah formal hanya akan menghasilkan peserta didik dengan pengetahuan ekonomi seadanya, dan baru sebatas mimpi dapat menghasilkan pelaku-pelaku ekonomi yang rasional sekaligus bermoral dan berke-

mampuan mengelola reaksi psikologis dalam berekonomi di kegiatan produktif maupun konsumtif.

Pada jalur pendidikan nonformal dan informal kelemahan yang ditemui makin tinggi dan beragam, meskipun sebenarnya sulit diidentifikasi. Oleh karena pada jalur pendidikan ini, kegiatan pendidikan ekonomi pada prinsipnya tidak terprogram, dan keberlangsungannya tergantung dari intensitas interaksi individu sebagai pebelajar dengan lingkungan sekitarnya, pada lingkup keluarga dan masyarakat terdekat, maupun kelompok - kelompok organisasi masyarakat yang diikuti. Di lingkup keluarga, keteladanan orang tua memiliki peran penting dalam pendidikan ekonomi di jalur nonformal dan informal. Hal tersebut sulit diharapkan, mengingat orang tua pada umumnya juga mengembangkan perilaku ekonomi yang kurang bisa diteladani. Dalam berbagai kelompok masyarakat, pendidikan ekonomi sering terabaikan, karena memang tidak pernah terpikirkan.

Tidak dapat diingkari berbagai kelemahan dalam perilaku ekonomi sumberdaya manusia dan masyarakat, berpengaruh pada upaya mencapai pertumbuhan ekonomi sebagai bagian dari proses pembangunan ekonomi. Produktivitas sumberdaya manusia, inovasi dalam kegiatan usaha, etos kerja, motivasi untuk meraih kesejahteraan, dorongan menabung dan berinvestasi, cerdas dan cermat dalam konsumpsi, dan respon positif dan kritis atas kebijakan-kebijakan ekonomi yang digulirkan oleh pemerintah, hanya akan dapat tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat, bila mereka memiliki landasan perilaku ekonomi yang baik.

Sementara landasan perilaku ekonomi yang baik hanya akan dapat dicapai melalui pengembangan dan pelaksanaan program pendidikan ekonomi yang baik dan berkualitas.

MEREKA PENDIDIKAN EKONOMI PLURALISTIK

Dalam buku *Teaching Economics in Troubled Times Theory and Practice for Secondary Social Studies*, Schug dan Gwartney (2011) mengungkapkan tentang sepuluh topik pembelajaran ekonomi yang perlu diketahui oleh guru dan peserta didik, meliputi:

1. Masalah insentif (*Incentives Matter*)
2. Tidak ada yang gratis dalam berekonomi (*There Is No Such Thing as a Free Lunch*)
3. Keputusan-keputusan dibuat dalam keterbatasan (*Decisions Are Made at the Margin*)
4. Perdagangan mendorong kemajuan ekonomi (*Trade Promotes Economic Progress*)
5. Biaya-biaya transaksi menjadi kendala untuk perdagangan (*Transaction Costs Are an Obstacle to Trade*)
6. Keuntungan mengarahkan bisnis terhadap berbagai aktivitas yang meningkatkan kesejahteraan (*Profits Direct Businesses Toward Activities That Increase Wealth*)
7. Manusia memperoleh pendapatan dengan membantu orang lain (*People Earn Income by Helping Others*)
8. Kemajuan ekonomi utamanya datang melalui perdagangan, investasi, cara lebih baik dalam melakukan sesuatu, dan institusi ekonomi yang sehat (*Economic Progress Comes Primarily Through Trade, Investment,*

Better Ways of Doing Things, and Sound Economic Institutions)

9. Tangan tak kelihatan dari harga pasar mengarahkan pembeli dan penjual terhadap kegiatan yang memajukan kesejahteraan umum (*The Invisible Hand of Market Price Directs Buyers and Sellers Toward Activities That Promote the General Welfare*)
10. Terlalu sering konsekuensi-konsekuensi jangka panjang, atau efek-efek sekunder dari suatu tindakan diabaikan (*Too Often Long-Term Consequences, or Secondary Effects of an Action Are Ignored*).

Dirasakan wajar manakala kesepuluh topik di atas, nuansa ide ekonomi pasar yang bersifat liberalis nampak kental melandasinya. Meskipun demikian apa yang terungkap memberikan kesadaran kepada kita, bahwa dalam pendidikan ekonomi perlu ditanamkan sikap dan komitmen positif terhadap peserta atas ideologi ekonomi yang dianut oleh bangsanya. Selain itu dengan pemahaman atas topik-topik tersebut, tak pelak akan memberikan kesadaran kepada peserta didik untuk membangun perilaku ekonomi yang produktif dan kritis atas praktek-praktek kegiatan ekonomi yang bertentangan dengan ideologi ekonomi yang berkembang di kalangan masyarakatnya. Topik butir 1 hingga 3 membangun sikap dan perilaku ekonomi yang mengarah pada rasionalitas keputusan individual, sedangkan topik-topik selanjutnya mengarah pada sikap dan komitmen serta kesadaran kritis atas ideologi ekonomi masyarakat bangsanya.

Di Indonesia tentu saja topik-topik tersebut dapat diperkaya dengan upaya penanaman ideologi

ekonomi bangsa (bila masih ada), berupa bahasan tentang ekonomi kerakyatan, pentingnya empati terhadap orang-orang miskin dan terpinggirkan dalam perekonomian, kemandirian ekonomi, pemanfaatan sumberdaya alam dengan memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan kelestariannya. Di samping itu perlu pula diperkaya dengan nilai-nilai etika moral ekonomi yang bersifat universal tidak terjebak pada nilai-nilai kepercayaan tertentu, seperti yang diungkapkan oleh Etzioni (1992) dan dikutip oleh Griffiths dkk (2001) yang menyatakan bahwa moralitas ekonomi terpaut dengan sikap imperatif (ketaatan pada aturan pranata dalam perekonomian, dan pemenuhan kewajiban dalam perekonomian); sikap tenggang rasa (kepedulian terhadap keberadaan orang lain, dan kemampuan untuk menimbang dampak tindakan terhadap pihak lain); menghargai kesetaraan (kemampuan untuk menimbang kondisi masyarakat sekitarnya dalam perilaku ekonomi, dan penghargaan terhadap persamaan hak sebagai pelaku ekonomi); dan menjunjung tinggi komitmen (sikap mengutamakan norma moral dalam perilaku ekonomi, dan sikap prososial dalam perilaku ekonomi, serta sikap mengutamakan kerja sama dalam perilaku ekonomi).

Untuk itu diperlukan komitmen tinggi untuk mengadakan perombakan mendasar atas kurikulum pendidikan ekonomi pada berbagai jenjang dan jenis pendidi-

kan, dengan melakukan perbaikan atas substansi materi pelajaran, sikuensi dan sistematika yang runtut pada tiap jenjang pendidikan formal. Selain itu diperlukan perubahan orientasi dan paradigma pendidikan ekonomi di kalangan pendidik dan pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan dan pelaksanaan pendidikan ekonomi, baik yang ada di LPTK Jurusan Pendidikan Ekonomi, Pusat Pengembangan Kurikulum Depdikbud beserta jajarannya. Perombakan yang dimaksud perlu disertai dengan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan ekonomi. Perbaikan sumber-sumber belajar yang tersedia, seperti buku paket memerlukan perombakan, literatur-literatur ekonomi disediakan di sekolah, akses terhadap data dan informasi ekonomi terkini perlu diperluas, utamanya di jenjang pendidikan menengah maupun tinggi.

Prakarsa untuk melakukan perombakan pendidikan ekonomi dapat dilakukan oleh LPTK Jurusan Pendidikan Ekonomi, melalui kerjasama antar lembaga dan dengan pengambil kebijakan di birokrasi pendidikan. Forum-forum ilmiah dapat diselenggarakan untuk mengawasi gerakan perbaikan dan perombakan pendidikan di negeri ini. Sosialisasi melalui berbagai sarana media dapat dilakukan secara nasional, untuk menggerakkan kepedulian semua elemen bangsa tentang pentingnya pendidikan ekonomi bagi pencapaian keberhasilan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.

Daftar Bacaan

Griffiths Brian, Sirico Robert A., Barry Norman, Field Frank, 2001. *Capitalism, Morality and Markets*. London: The

Institute of Economic Affairs. Groenewegen, John, 2007. *Teaching Pluralism in Economics*. Richmond, VA: KimMarie McGoldrick Robins School

- of Business
- Kornai János, Mátyás László, Roland Gérard, 2008. *Institutional Change and Economic Behaviour*. New York: Palgrave Macmillan.
- Mearman, A., Shoib, G., Wakeley, T. and Webber, D. J. 2012. Does pluralism in economics education make better educated, happier students? A qualitative analysis. Univ. of the West of England: *International Review of Economics Education* 10 (2)
- Reardon, Jack (Ed), 2009. *The Handbook of Pluralist Economics Education*. London: Routledge
- Phillips Anne, 2007. *Multiculturalism without Culture*. New Jersey: Princeton University Press.
- Rizzello Salvatore (Editor), 2003. *Cognitive Developments in Economics*. New York: Routledge.
- Sandlin Jennifer A., McLaren Peter (Editor), 2010, *Critical Pedagogies of Consumption Living and Learning in the Shadow of the "Shopocalypse"*. New York: Routledge
- Schug Mark C., Wood William C. (Editor), 2011. *Teaching Economics in Troubled Times Theory and Practice for Secondary Social Studies*. New York: Routledge.
- van Dalen, H. P. 2007. Pluralism in economics: A Public good or a public bad? In J. P. M. Groenewegen (Ed), *Teaching Pluralism in Economics*, (pp, 40-63) Cheltenham: Edward Elgar.
- Wagner Sigmund, Tsukamoto, 2009. *Is God an Economist? An Institutional Economic Reconstruction of the Old Testament*. New York: Palgrave Macmillan.
- Warlow Timothy D., 2007. Mid 18th Century Economic Changes: The rise of Adam Smith and the decline of the mercantilists and physiocrats: *Journal of Economics and Economic Education Research*, Volume 8 Number 3. www.alliedacademies.org.
- Yew-Kwang Ng, 2009. *Increasing Returns and Economic Efficiency*. New York: Palgrave Macmillan.